

Dibuntuti dari Bank, Rp50 Juta Melayang

Sumbawa Besar, GaungNUSRA

Aksi pencurian uang tunai sebesar Rp50 juta terjadi di wilayah Kecamatan Plampang, Selasa (21/4), sekitar pukul 11.00 Wita. Uang milik korban yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor, raib digondol pelaku yang diduga telah membuntuti korban sejak dari bank. Beruntung, hanya berselang beberapa jam saja pelakunya berhasil diringkus personel Polsek Plampang.

Kapolres Sumbawa melalui Kapolsek Plampang, Iptu Joko Wilopo yang dikonfirmasi, Rabu (22/4) pagi, membenarkan adanya kejadian itu. Korban diketahui bernama Abdullah Wakidi (71), seorang petani asal Desa Sepayung Kecamatan Plampang. Peristiwa itu terjadi di depan Pasar Plampang, tepatnya di sekitar Apotek JM Farma Dusun Karya Mulya.

Joko menjelaskan, bahwa kejadian bermula saat korban mengambil uang tunai sebesar Rp50 juta di BRI Unit
ke Halaman 11



AMANKAN -- Personel Polsek Plampang saat mengamankan barang bukti uang hasil pencurian MJ di rumah salah seorang keluarganya.

Pemda Sumbawa Usulkan Rp20 Miliar untuk Jembatan Lito

Sumbawa Besar, GaungNUSRA

Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mematangkan rencana pembangunan kembali Jembatan Lito yang ambruk akibat banjir pada 2024 lalu. Proyek strategis ini kini memasuki tahap penentuan mekanisme pendanaan, setelah seluruh dokumen teknis dinyatakan lengkap dan
ke Halaman 11

Terkendala SDM, Realisasi PAD Sumbawa Masih 9,21 Persen

Sumbawa Besar, GaungNUSRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa hingga triwulan pertama 2026, masih tergolong rendah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat capaian PAD baru menyentuh 9,21 persen atau sekitar Rp23,16 miliar dari total target Rp251,48 miliar.

Kepala Bapenda Sumbawa, Hardianto ST MM, mengakui capaian tersebut belum opti-

mal. Namun demikian, pihaknya tetap optimistis realisasi PAD akan meningkat pada triwulan berikutnya, seiring upaya intensifikasi dan optimalisasi potensi pendapatan daerah.

“Memang pada triwulan pertama realisasi biasanya masih rendah. Namun kami optimistis pada triwulan kedua akan meningkat dengan memaksimalkan potensi yang ada,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/4).

ke Halaman 11

Bangun Proyek Lebih Efisien Bersama Kami



Jalan Ahmad Yani No.59
RT10 / RW04 Kel. Sampir
Kec. Taliwang
Sumbawa Barat
085337357441



Efisiensi proyek dimulai dari alat yang tepat. Sewa crane handal dari PT Royal Krane Perkasa, siap bekerja di segala medan.

Bupati Sumbawa Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Sumbawa Besar, GaungNUSRA

Bupati Sumbawa, Ir H Syarafuddin Jarot MP, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026, yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa dalam keterangannya, Rabu (22/4), menyampaikan bahwa sensus ekonomi merupakan instrumen penting dalam menghasilkan data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi perekonomian, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Data tersebut jelasnya, nantinya akan menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan pembangunan.

“Data yang akurat menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan pembangunan, termasuk di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat



sangat dibutuhkan,” ujar Bupati.

Karena itu, Bupati Sumbawa mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Sumbawa untuk memberikan data yang sebenarnya, lengkap, dan apa adanya kepada petugas sensus.

Menurutnya, kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan informasi akan sangat menentukan kualitas data yang

dihasilkan.

“Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Sumbawa adalah instrumen penting untuk menghasilkan potret utuh perekonomian. Dukungan bapak-ibu semua sangat menentukan akurasi kebijakan ekonomi nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pemerataan kesejahteraan

masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah dapat memperkuat basis data sebagai referensi dalam menyusun berbagai program pembangunan yang tepat sasaran.

“Melalui sensus ini, kita perkuat referensi data pembangunan sehingga setiap program pemerintah benar-benar hadir sebagai solusi nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat Sumbawa,” jelasnya.

Diakhir penyampaiannya, Bupati kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Partisipasi Anda sangat berarti untuk menghadirkan data berkualitas menuju Sumbawa yang lebih maju, unggul, dan sejahtera,” pungkas Bupati Sumbawa. (Gac)

IKD Disosialisasikan, ASN Jadi Sasaran Awal Penerapan

Sumbawa Besar, GaungNUSRA

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar sosialisasi penerapan dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi ASN lingkup Pemkab Sumbawa. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula H Madilaoe ADT Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (22/4) pagi.

Kegiatan tersebut diikuti para ASN dari berbagai perangkat daerah sebagai langkah awal percepatan penerapan IKD di Kabupaten Sumbawa.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, H Varian Bintoro SSos MSi, melaporkan bahwa penerapan IKD di Kabupaten Sumbawa akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kalangan ASN.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini pengguna IKD di Kabupaten Sumbawa masih sangat rendah, yakni baru mencapai 0,36 persen dari total seluruh pemegang e-KTP.

Sementara itu, Bupati Sumbawa, Ir H Syarafuddin Jarot MP, mengatakan bahwa kemajuan teknologi digital mendorong transformasi dari



dokumen fisik menuju dokumen elektronik.

Menurutnya, IKD bukan sekadar foto KTP yang tersimpan di dalam telepon genggam, melainkan sebuah aplikasi resmi yang terintegrasi langsung dengan data pusat.

“IKD bukan sekadar foto KTP di dalam ponsel, melainkan sebuah aplikasi resmi yang terintegrasi langsung dengan data pusat,” tegasnya.

Bupati menilai penerapan IKD memberikan banyak manfaat. Mulai dari kemudahan akses data kependudukan, efisiensi dalam

pelayanan publik, hingga peningkatan keamanan dokumen.

Dengan menggunakan smartphone, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen penting seperti KTP, KK, data vaksinasi, NPWP, hingga BPJS dalam satu aplikasi. Selain itu, masyarakat tidak perlu lagi membawa berkas fisik atau memfotokopi KTP berulang kali dalam pengurusan layanan di perbankan maupun instansi pemerintah.

Dari sisi keamanan, IKD dinilai lebih aman karena mengurangi risiko kehilangan dokumen fisik

serta dilengkapi pengamanan ketat berupa PIN dan QR Code.

Pada kesempatan tersebut, Bupati meminta seluruh kepala OPD agar memastikan aplikasi IKD diterapkan oleh seluruh ASN di perangkat daerah masing-masing. Ia juga meminta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sumbawa menjadi pelopor atau role model dalam aktivasi IKD. Sehingga ke depan masyarakat luas dapat ikut beralih ke layanan digital tersebut.

“Kepada seluruh ASN, saya minta agar menjadi pelopor dalam aktivasi IKD ini. Target kita, seluruh masyarakat yang memiliki smartphone dapat beralih ke IKD,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta Disdukcapil untuk melakukan jemput bola ke desa-desa, sekolah, dan perkantoran guna mempermudah proses aktivasi IKD bagi masyarakat.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar penerapan IKD dapat berjalan lancar sekaligus dibarengi edukasi terkait keamanan data pribadi masyarakat. (Gar/Hms)

Pemda Sumbawa Dorong Implementasi Gerakan Sekolah Hijau Lestari

Sumbawa Besar, GaungNUSRA

Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) memperkuat implementasi Gerakan Sekolah Hijau Lestari. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor bersama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Sinergi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang diinisiasi Lingkara Kabupaten Sumbawa, sebagai upaya menjawab tantangan lingkungan melalui pendekatan pendidikan. Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Sekretaris Bapperinda, Dwi Rahayu ST MM, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepala Bidang Sekolah Dasar Dikbud Sumbawa, M Husnul Alwan SAg MMInov.

Rapat koordinasi tersebut memfokuskan pembahasan pada Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/1569/Dikbud/2026 tentang Gerakan Sekolah Hijau Lestari menuju Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut program Bupati Sumbawa dalam memperkuat kepedulian terhadap lingkungan melalui satuan pendidikan.



Melalui surat edaran tersebut, seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama, didorong untuk menerapkan konsep sekolah hijau secara nyata dan berkelanjutan.

Implementasi program dilakukan melalui berbagai langkah konkret, di antaranya pemanfaatan lahan sekolah sebagai kebun edukatif dengan menanam sayuran, buah-buahan, serta tanaman obat. Kegiatan ini tidak hanya mendukung penghijauan lingkungan sekolah,

tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran kontekstual bagi peserta didik.

Selain itu, satuan pendidikan juga diarahkan untuk mengembangkan taman ruang terbuka hijau guna menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan sehat. Pengelolaan sampah turut menjadi perhatian, dengan mendorong pemilahan serta pengolahan sampah organik dan anorganik secara bijak di lingkungan sekolah.

Kolaborasi lintas sektor ini dinilai sebagai langkah strategis

dalam menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini kepada generasi muda. Pendidikan dipandang sebagai instrumen efektif dalam membangun perilaku ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Diharapkan melalui sinergi antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan, Gerakan Sekolah Hijau Lestari dapat berjalan optimal serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. (Gad)

Satpol PP Sumbawa Gencarkan Sosialisasi Cukai dan Ketertiban di Brang Biji

Sumbawa Besar, GaungNUSRA

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa, terus mengintensifkan sosialisasi ketentuan cukai, sekaligus penguatan penegakan ketertiban umum di wilayah Kelurahan Brang Biji.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Sumbawa, Muhammad Sukarman STP, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, yakni melalui pertemuan tatap muka pada Selasa (20/4) dan dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke toko serta kios milik warga di seputaran kota Sumbawa, Rabu (22/4).

Menurut Sukarman, kegiatan sosialisasi itu merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait aturan cukai, khususnya peredaran rokok dan produk tembakau tanpa pita cukai.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan masyarakat memahami aturan yang berlaku,



terutama terkait rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan tatap muka yang dihadiri pemilik usaha, tokoh masyarakat, serta unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas, muncul berbagai masukan dari peserta. Salah satunya adalah harapan agar pemerintah lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran

rokok ilegal.

“Para pelaku usaha meminta agar pengawasan diperketat, karena rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat,” jelas Sukarman.

Selain itu, Sukarman juga menyampaikan bahwa pihaknya turut menyampaikan Instruksi Bupati terkait penertiban rumah

kos dan tempat penginapan lainnya. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tak hanya itu, sosialisasi juga mencakup Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), termasuk rencana pengaturan jam belajar bagi anak sekolah.

Lebih lanjut, Sukarman menyampaikan bahwa Satpol PP tidak hanya mengandalkan sosialisasi secara formal, tetapi juga melakukan pendekatan langsung ke lapangan.

“Setelah pertemuan, kami turun langsung ke toko dan kios untuk memberikan pemahaman secara door to door. Ini bentuk keseriusan kami dalam membangun kesadaran masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap, melalui langkah ini, peredaran rokok ilegal dapat ditekan, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman di Kabupaten Sumbawa semakin meningkat. (Gac)

Polemik Larangan Penanaman Jagung, Warga Mokong Datangi Dewan

Sumbawa Besar, GaungNUSRA

Polemik larangan penanaman jagung di sejumlah kawasan memicu keresahan warga Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu. Merespons kondisi tersebut, perwakilan masyarakat mendatangi DPRD Sumbawa untuk menyampaikan aspirasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II, Rabu (22/4).

RDP yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Sumbawa itu dipimpin Sekretaris Komisi II, H Zohran SH dan dihadiri sejumlah anggota dewan serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hadir pula unsur Dinas Pertanian, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Hukum, Bappeda, pihak Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV, Camat Moyo Hulu, hingga Pemerintah Desa Mokong.

Dalam forum tersebut, Kepala Desa Mokong, Siddiq, menyampaikan kekhawatiran masyarakat terhadap Surat Edaran (SE) Bupati Sumbawa yang melarang penanaman jagung di kawasan hutan, areal penggunaan lain (APL), perhutanan sosial, dan tanah negara.

Menurut Siddiq, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap sekitar 600 hektare lahan yang selama puluhan tahun—sekitar 30 hingga 40 tahun—telah digarap warga sebagai sumber mata pencaharian utama.

“Masyarakat kami dihantui ketakutan karena adanya ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah sebagaimana diatur dalam regulasi yang dirujuk. Padahal lahan ini satu-satunya tumpuan hidup mereka, bahkan sebagian sudah menjadi sawah,” ujarnya.

Selain persoalan larangan, pihak desa juga mempertanyakan



batas kewenangan kepala desa dalam penerbitan administrasi pertanian, seperti surat keterangan tanah (sporadik), serta penanganan aktivitas ilegal seperti pembalakan liar yang dinilai belum tuntas.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai KPH Wilayah IV, Ahyar, menegaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi kondisi kerusakan hutan yang kian mengkhawatirkan. Ia menyebut praktik budidaya jagung secara monokultur di kawasan hutan menjadi salah satu penyebab utama degradasi lingkungan.

Menurutnya, tanaman jagung membutuhkan paparan sinar matahari penuh sehingga dalam praktiknya kerap diikuti dengan penebangan atau mematikan pohon pelindung. Kondisi itu berdampak pada hilangnya vegetasi hutan, meningkatnya erosi, serta menurunnya daya serap air yang berujung pada bencana banjir.

“Visi ‘Sumbawa Hijau Lestari’ tidak akan tercapai jika praktik monokultur di kawasan hutan

terus dibiarkan. Surat edaran ini menjadi langkah awal untuk menata kembali pola budidaya masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, menegaskan bahwa surat edaran tersebut bukanlah larangan total, melainkan upaya penegasan dan pengaturan terhadap regulasi yang telah ada, termasuk merujuk pada ketentuan perundang-undangan di tingkat pusat.

Ia menjelaskan, larangan difokuskan pada kawasan hutan dan lahan dengan kemiringan tinggi yang berisiko memicu kerusakan lingkungan dan bencana alam. Pemerintah daerah, lanjutnya, juga telah menyiapkan alternatif komoditas pertanian yang lebih ramah lingkungan namun tetap bernilai ekonomis, seperti porang, kacang hijau, dan kacang tanah.

Senada, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir Ni Wayan Rumawati MSi, menekankan pentingnya verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi riil

penggunaan lahan. Ia mengakui banyak kawasan perbukitan yang mengalami degradasi akibat penanaman jagung secara masif.

“Kita harus jujur, banyak lahan pegunungan kini menjadi gundul. Kebijakan ini diambil untuk menyelamatkan lingkungan,” ujarnya.

Dari hasil RDP tersebut, Komisi II DPRD Sumbawa merumuskan sejumlah langkah tindak lanjut sebagai jalan tengah. Sekretaris Komisi II, Zohran mengatakan, rumusan tersebut, pertama, meminta KPH Wilayah IV melakukan verifikasi lapangan terhadap 600 hektare lahan di Desa Mokong guna memastikan status hukumnya, apakah masuk kawasan hutan lindung, hutan produksi, APL, perhutanan sosial, atau tanah negara.

Kedua, mendorong transformasi pola tanam dari monokultur menjadi agroforestri melalui skema perhutanan sosial, dengan dukungan pemerintah daerah berupa bantuan bibit tanaman kehutanan atau hortikultura.

Ketiga, meminta pemerintah daerah dan KPH meningkatkan sosialisasi regulasi secara persuasif kepada masyarakat, termasuk penegasan batas kawasan guna mencegah pembukaan lahan baru yang tidak sesuai ketentuan.

Keempat, DPRD menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan, dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara KPH dan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan tersebut.

“Pertemuan ini menjadi sinyal agar masyarakat lebih berhati-hati dalam beraktivitas di kawasan hutan. Kami akan mengawal proses verifikasi lahan ini agar tercipta keadilan bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” kata Zohran. (Gam)

BOX BARU

Harian Umum
GaungNUSRA
 MEDIA AMANAH

Diterbitkan oleh :

**PT. GAUNG NUSRA
 MEDIA AMANAH**

BTN Bukit Permai

Blok F No. 19

Telpon 0371 21617

Sumbawa Besar - NTB

PENASIHAT : Ahmad Zuhri Muhtar, Jamaluddin Afifi

PEMIMPIN UMUM / PEMIMPIN PERUSAHAAN : Abu Sufyan Muchtar;

WAKIL PEMIMPIN UMUM / KOMISARIS UTAMA : Junaidi Agang; **DIREKTUR PELAKSANA** : Mukhtar Sufyan Al Kandi; **DIREKTUR PERCETAKAN** : M. Fakhruddin; **KEPALA DIVISI LITBANG** : Shalahuddin MA, **KEPALA DIVISI KERJASAMA ANTAR LEMBAGA** : Akhyar Muslimin

PEMIMPIN REDAKSI / PENANGGUNGJAWAB : Randy Pratama;

REDAKTUR UTAMA : Ikhsanuddin, Adi Manaungi; Koordinator Liputan Khusus : Abdul Ma'ruf Rahmat;

DEWAN REDAKSI : Abu Sufyan Muchtar, Junaidi Agang, Randy Pratama, Adi Manaungi, Ikhsanuddin, Mukhtar Sufyan Al Kandi, Abdul Ma'ruf Rahmat, Abdul Hakim, Lulu Al Munawwarah, Diyar Mochtar, Gulung Anarkis Rahzen, Wahyu Prama Pratama; **Sekretaris Redaksi / Kepala Kantor** : Sari Rusfawani;

Bendahara Umum : Rafiqah; **Pracetak / Layout / Desain Grafis** : Mukhtar Sufyan Al Kandi / Diyar Mochtar; **Divisi Pemasaran dan Iklan** : Lulu Al Munawwarah, **Divisi Percetakan dan Sirkulasi** : Ardiyansyah; Susanto "Joker", Hardiyanto;

Alamat Kantor Redaksi / Pemasaran dan Iklan : BTN Bukit Permai Blok F No. 19 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Telp. 0371-21617, email : redaksigaungnusra@gmail.com; **PULAU LOMBOK** Jl. Pariwisata 25 A Mataram; **SUMBAWA BARAT** : RT 015 RW 05 Lingg. Sampir C, Kel. Sampir - Kec. Taliwang; **DOMPU** : Jl. Pelita Kampung Salama Bada; **BIMA** : Jl. Pemuda Tolotando-Matakando Kecamatan Mpunda; **BALI** : -- ; **NTT** : --.

Isi di Luar Tanggungjawab Percetakan CV. BINTANG TIGA, Jl. Dr. Cipto No. 81 Sumbawa Besar - NTB;

Jaksa Rampungkan Berkas Korupsi RSUD Sumbawa Jilid II

Sumbawa Besar, GaungNUSRA
 Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, tengah merampungkan proses pemberkasan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di RSUD Sumbawa tahun anggaran 2022–2023, yang dikenal sebagai kasus RSUD Sumbawa jilid II.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Indra Zulkarnain SH, menyampaikan bahwa proses pemberkasan saat ini sedang berjalan sebelum dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Ia menjelaskan, dalam perkara tersebut, penyidik kembali menetapkan dr Dede Hasan Basri sebagai tersangka. Penetapan dilakukan setelah tim penyidik menemukan unsur perbuatan melawan hukum, serta didukung alat bukti yang cukup, sebagaimana hasil gelar perkara internal.



“Penetapan tersangka telah dilakukan sejak 30 Desember 2025, setelah ditemukan bukti yang menguatkan adanya dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Indra, Rabu (22/4).

Kasus ini merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), yang menemukan potensi kerugian keuangan negara pada BLUD RSUD

Sumbawa mencapai sekitar Rp1,08 miliar.

Dalam struktur organisasi saat itu, dr Dede menjabat sebagai Direktur RSUD Sumbawa sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Posisi tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Saat ini, dr Dede diketahui

masih menjalani hukuman dalam perkara korupsi RSUD Sumbawa jilid I di Lembaga Pemasyarakatan Kuripan Lombok Barat. Apabila terbukti bersalah dalam perkara kedua ini, yang bersangkutan berpotensi menjalani tambahan hukuman sesuai putusan pengadilan.

Indra menambahkan, tim penyidik telah memeriksa belasan saksi serta sejumlah ahli guna memperkuat konstruksi perkara. Tahapan pemberkasan terus dipercepat agar segera dapat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

“Jika berkas perkara dinyatakan lengkap, maka akan dilanjutkan ke tahap penuntutan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Mataram untuk disidangkan,” katanya.

Kejari Sumbawa, tegas Indra, berkomitmen untuk menangani perkara tersebut secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Gad)

Jalan Lenangguar-Lunyuk Ditarget Rampung Mei

Mataram, GaungNUSRA

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pengerjaan proyek jalan provinsi ruas Lenangguar–Lunyuk di Kabupaten Sumbawa rampung pada Mei 2026. Proyek tersebut dinilai strategis karena menjadi akses utama bagi masyarakat di wilayah selatan Sumbawa, khususnya kawasan Lunyuk yang merupakan sentra produksi jagung.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Perkim NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan progres pengerjaan saat ini telah mencapai sekitar 70 hingga 80 persen. Pemerintah daerah pun mendorong percepatan pekerjaan agar jalan tersebut segera dapat difungsikan.

“Target kami awal Mei sudah bisa digunakan. Ini penting untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, baik untuk ekonomi maupun akses layanan dasar seperti kesehatan,” ujarnya, Rabu (22/4).

Proyek peningkatan jalan sepanjang kurang lebih 60 kilometer itu sebelumnya sempat mengalami kendala. Kusuma menjelaskan, hambatan terjadi karena kontraktor awal tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, meskipun telah



diberikan perpanjangan kontrak.

Selain itu, faktor alam turut mempengaruhi proses pengerjaan, seperti curah hujan tinggi dan kondisi medan yang rawan longsor. Situasi tersebut menyebabkan pekerjaan harus dihentikan sementara demi menjaga keselamatan.

“Di awal pengerjaan cukup sulit karena kondisi alam yang tidak bisa diprediksi, termasuk

potensi longsor. Pekerjaan baru dilanjutkan setelah kondisi dinyatakan aman,” katanya.

Meski demikian, proyek dengan nilai lebih dari Rp19 miliar tersebut kini kembali berjalan normal dan terus dikebut di lapangan. Pemerintah juga mengingatkan pihak kontraktor untuk memaksimalkan pekerjaan sesuai target waktu yang telah ditentukan.

Keberadaan ruas jalan Lenangguar–Lunyuk memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat. Selain mendukung distribusi hasil pertanian, jalan ini juga menjadi jalur vital untuk akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Sebelumnya, kondisi jalan yang rusak parah kerap menghambat aktivitas warga. Dengan perbaikan yang tengah dilakukan, diharapkan konektivitas antarwilayah dapat meningkat secara signifikan.

Kusuma menambahkan, kontrak pengerjaan proyek tersebut sebenarnya masih berlaku hingga Juni 2026. Namun demikian, pemerintah daerah tetap menargetkan penyelesaian lebih cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan, apabila pekerjaan tidak rampung sesuai jadwal, kontraktor akan dikenakan sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pembayaran proyek tidak dapat dilakukan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai sepenuhnya.

“Jika terjadi keterlambatan, tentu ada konsekuensi denda. Pembayaran juga baru bisa dilakukan setelah progres mencapai 100 persen,” tegasnya. (Ant)

KSB Perkuat Kebijakan Wajib PAUD Satu Tahun



Sumbawa Barat, GaungNUSRA Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menegaskan komitmennya dalam memperkuat kebijakan wajib belajar satu tahun prasekolah. Hal ini dilakukan, sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia sejak dini.

Komitmen tersebut

disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan advokasi yang digelar di Ruang Rapat Gili Paserang Graha Praja Taliwang, Rabu (22/4). Kegiatan ini menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD), sebagai fondasi dalam membentuk kesiapan emosional, sosial, dan akademik anak,

sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

Data pemerintah daerah menunjukkan, hingga saat ini sebanyak 6.301 anak telah terlayani di 170 satuan PAUD, dengan dukungan 284 tenaga pendidik. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Diantaranya,

keterbatasan tenaga pendidik akibat peralihan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta belum optimalnya kualifikasi guru PAUD.

Selain itu, tingkat partisipasi anak dalam layanan PAUD, juga masih perlu ditingkatkan. Agar seluruh anak usia prasekolah, dapat memperoleh akses pendidikan yang merata.

Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj Hanipah, menegaskan bahwa pendidikan prasekolah merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi masa depan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia sejak usia dini.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam memperluas jangkauan layanan PAUD. Sinergi tersebut melibatkan peran Bunda PAUD, Tim Penggerak PKK, serta pemerintah kecamatan dan desa.

Upaya ini juga diperkuat melalui program KSB Maju dan PIDAR, dengan tujuan memastikan tidak ada anak usia 5 hingga 6 tahun yang tertinggal dari layanan pendidikan dasar. (Gad/Hms)

FISIPol U45 Mataram Perkuat Sinergi dengan PWI NTB

Mataram, GaungNUSRA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPol) Universitas 45 Mataram, memperkuat sinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, melalui kunjungan audiensi strategis, Rabu (22/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Rombongan FISIPol dipimpin Dekan Lalu Ahmad Rahmat SSos MM, didampingi sejumlah mahasiswa semester dua dan empat. Kehadiran mereka disambut Ketua PWI NTB Ahmad Ikliluddin, bersama Sekretaris PWI NTB Fachrul Mustafa dan jajaran pengurus.

Lalu Ahmad Rahmat menjelaskan, kunjungan ini bertujuan menjembatani teori yang diperoleh di bangku kuliah, dengan praktik di lapangan. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik dan Manajemen Komunikasi Organisasi, diajak memahami langsung dinamika organisasi profesi kewartawanan.

Menurutnya, pendekatan pembelajaran berbasis



pengalaman lapangan, penting untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa secara komprehensif. "Mahasiswa tidak hanya memahami materi secara tekstual, tetapi juga memperoleh pengalaman empiris yang akan dituangkan dalam laporan akademik sebagai bagian dari penilaian Ujian Tengah Semester," ujarnya.

Selain itu, kunjungan tersebut juga membuka peluang kolaborasi riset di bidang

komunikasi dan media. FISIPol Universitas 45 Mataram berencana menjalin kerja sama formal melalui nota kesepahaman (MoU), termasuk menghadirkan praktisi media sebagai pengajar di kampus.

"Kedepan, kami ingin menghadirkan praktisi PWI ke dalam kampus untuk memperkuat kualitas riset dan literasi media mahasiswa agar lebih relevan dengan tantangan zaman," kata Lalu Ahmad Rahmat.

Sementara itu, Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan kesiapan PWI NTB menjadi mitra strategis bagi kalangan akademisi, termasuk dalam penyediaan data, ruang diskusi, hingga fasilitas pembelajaran lapangan.

"Kami siap memfasilitasi kebutuhan data maupun ruang diskusi bagi civitas akademika, termasuk dari FISIPol Universitas 45 Mataram," ujar Ikliluddin.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan organisasi profesi, dalam mencetak jurnalis yang kompeten dan berintegritas. Melalui rencana kerja sama yang akan dijalin, PWI NTB berkomitmen menghadirkan praktisi senior sebagai instruktur praktik bagi mahasiswa.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti kerja sama secara formal. Kedua pihak berharap sinergi ini dapat menyelaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri media, sekaligus berkontribusi dalam menghadirkan informasi yang berkualitas bagi masyarakat. (Gad/Hms)

Semarak Milad ke-48, MAN 1 Sumbawa

Gelar Kejuaraan Volly School Meeting Antar Sekolah se-Kabupaten

Sumbawa Besar, GaungNUSRA

Dalam rangka memeriahkan Milad ke-48, MAN 1 Sumbawa secara resmi membuka Kejuaraan Volly School Meeting antar sekolah/madrasah se-Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini berlangsung meriah di lapangan utama madrasah dan diikuti oleh puluhan tim dari berbagai SMA/MA se-Kabupaten Sumbawa.

Sorak sorai para suporter menambah semarak suasana, menandakan antusiasme tinggi terhadap ajang olahraga bergengsi ini.

Kepala MAN 1 Sumbawa, Zulhidayat SPd, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturahmi antar pelajar serta menumbuhkan jiwa sportivitas, disiplin, dan kerja sama tim. Zulhidayat menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen madrasah dalam mencetak generasi yang unggul, tidak hanya secara akademik, tetapi juga dalam bidang olahraga.

“Melalui kejuaraan volly ini, kami berharap lahir bibit-bibit atlet muda yang berprestasi serta mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.



Kejuaraan ini akan berlangsung selama kurang lebih 12 hari ke depan dengan sistem pertandingan yang kompetitif. Para peserta akan memperebutkan gelar juara sekaligus membawa nama baik sekolah masing-masing. Dengan digelarnya kegiatan ini, Milad ke-48 MAN 1 Sumbawa tidak hanya menjadi momen perayaan, tetapi juga ajang

pengembangan potensi siswa dalam bidang olahraga, khususnya bola voli, serta memperkuat semangat persatuan di kalangan generasi muda Sumbawa. (Glu)

Lape Alami 26 Hari Tanpa Hujan, Indikator Kemarau di NTB

Mataram, GaungNUSRA

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat wilayah Lape Kabupaten Sumbawa, mengalami hari tanpa hujan terpanjang di Nusa Tenggara Barat, dengan durasi mencapai 26 hari. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator awal masuknya musim kemarau di wilayah setempat.

Prakirawan Stasiun Klimatologi BMKG NTB, Suci Agustiari, menjelaskan bahwa fenomena hari tanpa hujan dalam rentang waktu tersebut merupakan hal yang wajar terjadi di NTB saat periode kemarau.

“Hari tanpa hujan selama 26 hari saat kemarau masih tergolong normal, termasuk yang terjadi di Kecamatan Lape,” ujarnya, Rabu (22/4).

Menurutnya, saat ini sebagian besar wilayah NTB telah memasuki musim kemarau, sementara sebagian lainnya masih berada dalam masa peralihan atau pancaroba. Pola pergerakan musim kemarau yang datang dari arah timur



menyebabkan wilayah pesisir timur, termasuk di Pulau Lombok, Sumbawa, dan Bima, lebih dahulu mengalami periode kering.

Meskipun secara administratif berada di Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Lape termasuk kawasan pesisir timur yang rentan lebih cepat mengalami penurunan curah hujan.

Pada dasarian II April 2026, BMKG mencatat sebagian besar wilayah NTB didominasi curah hujan kategori rendah hingga menengah, dengan sifat hujan umumnya berada di bawah normal.

Selain Lape, sejumlah wilayah lain di NTB juga mengalami hari tanpa hujan kategori menengah, yakni dalam rentang 11 hingga 20

hari. Di antaranya wilayah Sambelia dan Jerwaru di Lombok Timur, Sekotong dan Gedung di Lombok Barat, serta Plampang dan Empang di Kabupaten Sumbawa.

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Bima, meliputi Wowo, Bolo, dan Soromandi. Sementara itu, Lombok Tengah tercatat sebagai daerah dengan sebaran hari tanpa hujan kategori menengah terbanyak, mencakup wilayah Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Pujut, Janapria, Batukliang, Jonggat, dan Praya Timur.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mulai mengantisipasi potensi kekeringan dengan memanfaatkan sisa curah hujan yang masih terjadi, terutama untuk kebutuhan air bersih dan sektor pertanian.

Langkah antisipatif dinilai penting mengingat musim kemarau di NTB kerap berdampak pada ketersediaan air dan produktivitas pertanian masyarakat. (Ant)

Kloter Pertama Calon Haji NTB Tiba di Makkah

Lombok Tengah, GaungNUSRA

Sebanyak 393 jamaah calon haji dan petugas dari kelompok terbang (kloter) pertama asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dilaporkan telah tiba di Makkah, Arab Saudi, setelah diberangkatkan melalui Bandara Internasional Lombok, Rabu (22/4) dini hari.

General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Aidhil Philip Julian, mengatakan penerbangan perdana embarkasi haji Lombok tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Penerbangan haji kloter pertama embarkasi Lombok berjalan dengan lancar. Ini menjadi awal yang baik untuk seluruh rangkaian keberangkatan jamaah tahun ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jamaah kloter pertama yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur tersebut diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia jenis Boeing 777-300ER dengan nomor penerbangan GA5101.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan embarkasi haji



Lombok tahun ini direncanakan berlangsung dalam 15 kelompok terbang. Seluruh penerbangan dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia dengan jenis pesawat yang sama.

Aidhil menegaskan, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan operasional guna memastikan kelancaran proses keberangkatan jamaah, termasuk peningkatan fasilitas dan layanan. “Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, terutama bagi jamaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus,”

katanya.

Pada tahun ini, sejumlah peningkatan layanan turut dihadirkan, di antaranya penggunaan eskalator serta penyediaan elevator bagi pengguna kursi roda di area kedatangan internasional. Selain itu, proses naik ke pesawat dilakukan melalui garbarata guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan jamaah.

Peningkatan layanan tersebut sejalan dengan komitmen menghadirkan pelayanan ramah bagi lansia, disabilitas, dan

perempuan.

Untuk mengantisipasi kepadatan pengantar jamaah, pihak bandara juga menyiapkan area khusus bagi keluarga yang ingin menyaksikan keberangkatan melalui siaran langsung. Pengamanan turut diperkuat melalui koordinasi dengan Polda NTB, serta pengaturan arus lalu lintas bersama Dinas Perhubungan.

Selain itu, proses pemeriksaan keamanan penumpang dan barang bawaan dilakukan lebih awal di Asrama Haji Lombok di Kota Mataram. Dengan sistem ini, jamaah yang tiba di bandara dapat langsung melaksanakan proses boarding tanpa antrian panjang.

“Langkah ini diharapkan dapat mempercepat alur pelayanan sekaligus meningkatkan kenyamanan jamaah,” ujar Aidhil.

Dengan berbagai kesiapan tersebut, manajemen bandara optimistis seluruh rangkaian penyelenggaraan embarkasi haji Lombok tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan pengalaman perjalanan yang optimal bagi seluruh jamaah. (Ant)

71 Persen Calon Haji Mataram Berisiko Tinggi

Mataram, GaungNUSRA

Dinas Kesehatan Kota Mataram, mencatat mayoritas jamaah calon haji asal daerah tersebut pada musim haji 1447 Hijriah/2026 masuk kategori risiko tinggi (risti). Dari total 809 calon haji yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan, sekitar 71 persen di antaranya diklasifikasikan memiliki risiko kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr H Emirald Isfihan, mengatakan tingginya angka jamaah berisiko tinggi dipengaruhi berbagai faktor, terutama usia dan kondisi kesehatan yang menyertai.

“Calon haji yang masuk kategori risti dipicu beragam penyebab, salah satunya faktor usia. Tahun ini jamaah masih didominasi lanjut usia,” ujarnya, Rabu (22/4).

Selain faktor usia, kondisi penyakit penyerta juga menjadi penyebab utama. Emirald menjelaskan, sebagian besar jamaah risti mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi serta penyakit degeneratif lain yang umum diderita kelompok lanjut usia.

Tidak hanya itu, sejumlah jamaah juga tercatat mengidap



diabetes dan beberapa penyakit kronis lainnya. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai masih memenuhi syarat kelayakan kesehatan untuk menunaikan ibadah haji.

“Ada diabetes dan beberapa penyakit lainnya, tetapi masih memenuhi kriteria istitaah kesehatan,” katanya.

Ia menegaskan, meskipun tergolong berisiko tinggi, para jamaah tersebut tetap dinyatakan layak berangkat ke Tanah Suci berdasarkan hasil penilaian melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes).

“Dari sisi kesehatan, jamaah sudah memenuhi istitaah. Jadi walaupun berisiko tinggi, mereka masih mampu melaksanakan ibadah,” ujarnya.

Untuk memastikan kondisi jamaah tetap terjaga selama menjalankan ibadah, Dinas Kesehatan Kota Mataram telah berkoordinasi dengan tim kesehatan yang akan mendampingi jamaah di Tanah Suci. Petugas diminta memberikan perhatian khusus kepada jamaah dengan risiko tinggi, baik dalam aspek pengobatan maupun pencegahan.

“Kami sudah mengingatkan petugas agar memberikan pendampingan lebih, tidak hanya terkait pengobatan tetapi juga langkah-langkah pencegahan selama di Tanah Suci,” katanya.

Emirald juga menekankan pentingnya menjaga pola makan, istirahat, dan konsumsi obat secara teratur bagi jamaah. Menurutnya, faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

Selain itu, kondisi cuaca panas ekstrem di Arab Saudi menjadi perhatian serius. Perubahan suhu yang cukup tinggi berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti dehidrasi hingga heat-stroke.

“Kondisi cuaca panas harus diantisipasi. Tim kesehatan akan terus mengingatkan jamaah untuk rutin minum air putih dan mengonsumsi obat agar tidak mengalami dehidrasi,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh jamaah calon haji asal Kota Mataram dapat menjalankan ibadah dengan lancar, aman, dan tetap dalam kondisi kesehatan yang terjaga hingga kembali ke tanah air. (Ant)

Telusuri Dugaan Korupsi PKK, Kejari Dompu Gandeng Inspektorat

Dompu, GaungNUSRA

Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, terus menelusuri dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tahun 2022–2023. Dalam upaya tersebut, kejaksaan menggandeng Inspektorat Dompu untuk mengkaji potensi kerugian keuangan negara.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Dompu, Danny Curia Novitawan, mengatakan pelibatan inspektorat dilakukan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB tidak dapat melanjutkan audit penghitungan kerugian negara.

“Sekarang kami menunggu hasil dari inspektorat, setelah itu

baru ditindaklanjuti,” ujarnya, Rabu (22/4).

Sebelumnya, Kejari Dompu telah berkoordinasi dengan BPKP NTB guna menelusuri kemungkinan kerugian negara dalam perkara tersebut. Namun, berdasarkan telaah awal terhadap dokumen hasil penyelidikan kepolisian, BPKP tidak menemukan indikasi kerugian negara sehingga proses audit tidak dapat dilanjutkan.

Menindaklanjuti hal itu, Kejari Dompu menyerahkan seluruh dokumen yang telah dikaji BPKP kepada Inspektorat Dompu untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut.

“Dokumen dari BPKP sudah kami terima dan seluruhnya kami serahkan ke inspektorat,” kata

Danny. Ia mengakui, penanganan perkara yang masih berada pada tahap penyelidikan tersebut memerlukan waktu cukup panjang hingga masuk dalam daftar tunggakan. Meski demikian, pihaknya memastikan proses tetap berjalan sesuai prosedur hukum, termasuk pendalaman terhadap unsur perbuatan melawan hukum.

Dalam rangka pengumpulan keterangan, penyidik telah meminta klarifikasi dari sejumlah pihak. Di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Dompu tahun anggaran 2022–2023, Lilis Suryani, serta sejumlah pengurus PKK dan perwakilan instansi terkait, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu.

Perkara ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang menduga adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah PKK dari Pemerintah Kabupaten Dompu. Nilai dugaan kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2 miliar.

Dugaan penyimpangan itu antara lain mengarah pada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang disinyalir tidak sesuai fakta atau fiktif.

Kejari Dompu menegaskan akan menindaklanjuti hasil kajian inspektorat sebagai dasar menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan peningkatan status perkara apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi. (Ant)

Pemkot Mataram Percepat Digitalisasi Bansos

Mataram, GaungNUSRA

Pemerintah Kota Mataram, mempercepat digitalisasi perlindungan sosial dan bantuan sosial (bansos) melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut penetapan Kota Mataram sebagai daerah percontohan digitalisasi penyaluran bansos oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, H Mansur, mengatakan percepatan aktivasi IKD menjadi fokus utama dalam mendukung implementasi program tersebut, terutama bagi petugas lapangan yang terlibat langsung dalam penyaluran bantuan sosial.

“Fokus kami dalam minggu ini adalah mendukung komitmen Wali Kota Mataram melalui aktivasi IKD bagi petugas di lapangan,” ujarnya, Rabu (22/4). Menurutnya, proses aktivasi IKD telah mulai dilakukan terhadap sekitar 1.200 petugas lapangan dalam dua hari terakhir. Mereka terdiri atas petugas Dukcapil, Dinas Sosial, serta tenaga pendamping bansos di tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Mataram.

Mansur menjelaskan, aktivasi IKD bertujuan untuk memastikan seluruh data penerima bansos, mulai dari Desil 1 hingga Desil 4,

dapat terverifikasi secara akurat dan terintegrasi dalam sistem digital kependudukan.

Penggunaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisasi potensi data ganda maupun penyalahgunaan data dalam penyaluran bantuan sosial.

“Dengan sistem ini, verifikasi data menjadi lebih akurat dan transparan,” katanya.

Ke depan, para petugas yang telah memiliki IKD akan melakukan verifikasi langsung di lapangan terhadap para penerima manfaat. Sementara bagi warga yang belum memiliki telepon pintar atau mengalami keterbatasan akses digital, petugas akan membantu proses pendataan dan perekaman secara langsung. Pelaksanaan aktivasi IKD dilakukan secara terpadu di enam kecamatan di Kota Mataram. Pada tahap awal, program ini difokuskan pada pendataan penerima bansos sebelum nantinya diperluas ke masyarakat umum secara bertahap.

Meskipun tengah mengintensifkan program digitalisasi bansos, Mansur menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di kantor Dukcapil tetap berjalan normal seperti biasa.

“Pelayanan harian tetap kami jalankan tanpa mengganggu pelayanan publik yang sudah berjalan,” ujarnya. (Ant)

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN SUMBAWA

#NIKMAT BERZAKAT
TENTRAMNYA MUZAKI,
BAHAGIANYA MUSTAHIK

Dr. M. IRHASAN SAFFITRI, M.Si
Wakil Ketua I

LURMAN HARIM, S.H., M.Si
Wakil Ketua II

SYUKRI MAHMAT, S.Ag. M.M.Indov.
Ketua

INDAH SETIA WINGSIL, A.Ma.,Pd.Si
Wakil Ketua III

M. LUTFI WAHID, S.Pd., M.Si
Wakil Ketua IV

"Memberi itu Nikmat, Berzakat itu Berkah"
Ingat, 2,5 % Bukan Milik Kita..

Mari tunaikan zakat Anda Ke BAZNAS Melalui Metode Berikut :

- Setor Langsung ke Sekretariat BAZNAS Kab. Sumbawa
Alamat: Jl. Hasanuddin No. 01 Kel. Bugis (EKS. DPRD Lama)
- Layanan Jemput Zakat
Amil BAZNAS Kab. Sumbawa menjemput ke tempat yang sudah di sepuhaki
- Melalui GHIS BAZNAS Kab. Sumbawa atau website baznas

Atau Transfer Ke Rekening

Bank NTB Syariah	Zakat Infaq 004.21.00208006 004.22.20955015	mandiri	Zakat Infaq 161.0008518511 16100095195118
BSI BANK SYARIAH INDONESIA	Zakat Infaq 049.7470526 049.7465947	BANK BRI	Zakat 1835.01.00095353.4

Layanan BAZNAS: 081936955747 | baznaskab.sumbawa@baznas.go.id

@baznaskab.sbww | baznas.kab.sumbawa | Kabsumbawa.baznas.go.id

Berkas Kasus Masker Covid P-21

Mataram, GaungNUSRA

Kejaksaan Negeri Mataram menyatakan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 tahun anggaran 2020 di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjerat enam tersangka telah lengkap atau P-21. Dengan demikian, proses hukum kasus tersebut segera berlanjut ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Ida Made Oka Wijaya, mengatakan hasil penelitian jaksa penuntut umum menyimpulkan seluruh materi berkas telah memenuhi unsur formil dan materiil.

“Hasil penelitian jaksa menyatakan berkas sudah lengkap atau P-21,” ujarnya, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan, saat ini jaksa penuntut umum tengah berkoordinasi dengan penyidik dari Polresta Mataram untuk pelaksanaan tahap dua, yakni penyerahan tersangka beserta barang bukti.

“Untuk tahap dua, kami masih berkoordinasi dengan penyidik,” katanya.

Sebelumnya, proses pemberkasannya perkara ini sempat mengalami bolak-balik antara penyidik dan jaksa peneliti. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram, AKP I Made Dharma Yulia Putra, mengungkapkan bahwa jaksa



memberikan sejumlah petunjuk tambahan guna melengkapi berkas perkara.

Petunjuk tersebut antara lain berkaitan dengan pendalaman keterangan ahli dari berbagai bidang, seperti hukum pidana, keuangan, auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Selain itu, penyidik juga diminta melengkapi keterangan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penjahit masker yang berada di Pulau Sumbawa, khususnya di Kecamatan Empang dan Plampang.

Dalam proses penyempurnaan berkas, jaksa turut meminta penyidik melakukan pemilahan berkas perkara. Dari sebelumnya tiga berkas untuk enam tersangka, kemudian dipisah menjadi lima berkas.

Berkas perkara milik mantan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Wirajaya Kusuma, dan Kamaruddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen dipisahkan masing-masing. Sementara berkas M Haryadi Wahyudin dan Chalid Tomasoang Bulu digabung dalam satu berkas. Adapun berkas Dewi Noviany dan Rabiatul Adawiyah tetap berdiri sendiri.

Sebelumnya, empat tersangka yakni Wirajaya Kusuma, Chalid

Tomasoang Bulu, M Haryadi Wahyudin, dan Kamaruddin sempat berada dalam satu berkas karena dianggap memiliki keterkaitan peran dalam perkara tersebut.

Dalam rangka melengkapi berkas, penyidik telah memeriksa sedikitnya 120 saksi dan ahli. Hasil audit dari BPKP Perwakilan NTB juga telah mengungkap adanya kerugian negara sebesar Rp1,58 miliar dari total nilai pengadaan masker yang mencapai Rp12,3 miliar. Enam tersangka dalam perkara ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian juga telah mengubah status penahanan para tersangka menjadi tahanan kota. Sebelumnya, keenam tersangka sempat menjalani penahanan di Rumah Tahanan Polresta Mataram.

Dengan dinyatakan berkas lengkap, perkara ini segera memasuki tahapan penuntutan di pengadilan, sekaligus menjadi langkah lanjutan dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang penanganan pandemi di daerah tersebut. (Ant)

Kedapatan Beraksi, Maling Motor Diamuk Massa

Lombok Timur, GaungNUSRA

Seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor berinisial MH (35), warga Desa Suele Kabupaten Lombok Timur, menjadi sasaran amukan massa setelah tertangkap saat beraksi di Desa Aikmel Timur, Selasa (21/4) malam.

Peristiwa tersebut bermula ketika pelaku diduga mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di depan rumah korban. Aksi pelaku diketahui oleh pemilik kendaraan yang kemudian berteriak meminta pertolongan. Teriakan itu mengundang perhatian warga sekitar yang langsung melakukan pengejaran hingga pelaku berhasil ditangkap.

Setelah tertangkap, pelaku sempat menjadi sasaran kemarahan warga dan mengalami penganiayaan sebelum akhirnya aparat kepolisian datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi.



Namun, proses evakuasi tidak berjalan mudah karena mendapat perlawanan dari massa.

Warga yang tersulut emosi juga merusak dan membakar sepeda motor yang digunakan pelaku. Situasi di lokasi sempat memanas ketika aparat kepolisian

dilempari batu oleh massa yang menolak pelaku diamankan.

Dalam upaya mengendalikan situasi, aparat menggunakan tameng untuk menahan lemparan. Bahkan, dua anggota kepolisian dari Brimob dan Polres Lombok Timur dilaporkan mengalami luka

akibat terkena lemparan batu.

Karena kondisi semakin tidak terkendali, aparat terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Langkah tersebut berhasil meredakan situasi dan aparat kemudian mengevakuasi pelaku ke kantor polisi untuk diamankan.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Lalu Rusmaladi, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia menyatakan, pihak kepolisian telah mengamankan terduga pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini dalam penanganan aparat kepolisian,” ujarnya, Rabu (22/4).

Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum guna menghindari potensi kerugian dan korban lebih lanjut. (Ant)

Dibuntut Dari Bank...

Dari Halaman 1

Plampang. Setelah itu, korban menuju pasar untuk membeli kebutuhan dan memarkirkan sepeda motornya di depan apotek.

“Dari hasil penyelidikan, pelaku sudah mengamati korban sejak berada di bank. Korban kemudian dibuntuti hingga ke lokasi pasar,” ujar Joko.

Usai berbelanja, korban sempat kembali ke motornya dan berencana pulang. Namun dalam perjalanan, korban kembali berhenti di sebuah apotek lain di sekitar lokasi. Saat itulah korban membuka jok motornya dan mendapati uang yang disimpan di dalam bagasi sudah tidak ada.

Korban yang panik kemudian pulang ke rumah untuk memberi tahu keluarga, sebelum akhirnya melapor ke pihak bank dan Polsek Plampang pada sore harinya.

Mendapat laporan tersebut, petugas segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi, termasuk di area bank dan toko terdekat.

Dari hasil rekaman CCTV, polisi menemukan adanya gerak-gerik mencurigakan dari seseorang yang diduga sebagai pelaku. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan lanjutan.

“Sekitar pukul 17.50 Wita,

terduga pelaku berhasil diamankan di rumahnya tanpa perlawanan,” kata Kapolsek.

Pelaku diketahui berinisial MJ (41), warga Desa Plampang. Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui telah mengambil uang korban dari dalam bagasi sepeda motor.

Pada pengakuannya, sebagian uang hasil curian telah digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk menebus kendaraan yang digadaikan, membayar utang, serta kebutuhan lainnya. Sementara sebagian besar uang lainnya disembunyikan di rumah kerabat pelaku.

Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp41,2 juta, dua unit sepeda motor, serta satu unit telepon genggam.

Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolsek Plampang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Joko mengimbau masyarakat agar lebih waspada, terutama setelah mengambil uang dalam jumlah besar dari bank.

“Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak menyimpan uang dalam kendaraan dan selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, karena pelaku kejahatan bisa mengintai kapan saja,” tegasnya.

(Gar)

Terkendala SDM...

Dari Halaman 1



Ia menjelaskan, belum maksimalnya capaian PAD disebabkan sejumlah sektor unggulan belum terdata secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Bapenda dalam melakukan pendataan di lapangan.

Menurutnya, rencana penambahan tenaga melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pendataan hingga saat ini belum terealisasi. Akibatnya, proses pemutakhiran data potensi pajak daerah berjalan lambat.

“Pendataan sektor PAD memang belum maksimal karena SDM kami terbatas. Rencana penempatan tenaga PPPK untuk pendataan belum terealisasi,” katanya. Saat ini, lanjut dia, kontribusi terbesar PAD masih didominasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya dari sektor listrik. Selain itu, potensi dari pajak restoran, hotel, serta makan dan minum juga mulai memberikan kontribusi, meskipun belum signifikan. Sementara itu, sejumlah sektor lain dinilai masih

belum tergarap secara optimal.

Untuk mengejar target yang telah ditetapkan, Bapenda menerapkan strategi intensifikasi dengan turun langsung ke lapangan guna menggali potensi pajak yang belum maksimal.

“Kami melakukan pendekatan langsung ke lapangan, terutama pada sektor-sektor yang belum tergarap optimal,” ujarnya.

Selain menggali potensi baru, pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang nilainya masih cukup besar. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan verifikasi data wajib pajak secara menyeluruh.

Proses verifikasi tersebut melibatkan 157 desa dan delapan kelurahan di Kabupaten Sumbawa guna memastikan validitas data sebelum dilakukan penagihan.

“Kami lakukan verifikasi hingga data benar-benar final agar penagihan bisa maksimal. Potensi PBB-P2 masih cukup besar untuk dikejar,” kata Hardianto. (Gar)

Pemda Sumbawa Usulkan... dari Halaman 1



diverifikasi oleh instansi terkait. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Much Sofyan ST, menjelaskan bahwa proses verifikasi terakhir telah dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selanjutnya, tahapan perencanaan detail telah rampung dan mendapatkan justifikasi dari Balai Jalan Nasional.

“Perencanaan detail sudah

selesai dan sudah dijustifikasi oleh Balai Jalan Nasional. Rekomendasinya juga sudah kami teruskan ke BNPB. Sekarang tinggal menunggu apakah mekanisme pembangunan dilakukan melalui kementerian pusat atau melalui daerah,” ujarnya, Rabu (22/4).

Dalam usulan tersebut, pemerintah daerah merancang pembangunan Jembatan Lito dengan tipe girder bridges.

Jembatan ini direncanakan memiliki dua bentang masing-masing sepanjang 20 meter, dengan lebar mencapai 6 meter. Total anggaran yang diusulkan untuk proyek ini sebesar Rp20,2 miliar.

Menurut Sofyan, saat ini seluruh dokumen dan data pendukung telah berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal itu menandakan bahwa proses administrasi di tingkat daerah telah tuntas, dan tinggal menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Sekarang tahapannya

memang di BNPB, karena semua data sudah lengkap dan sudah kami serahkan,” katanya.

Selain Jembatan Lito, lanjut Sofyan, Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa juga mengusulkan pembangunan infrastruktur lain. Seperti Jembatan Kayu Madu, yang diajukan melalui skema IJD di kawasan Lingkar Utara Alas. Proyek tersebut masih menunggu kepastian dari Kementerian Pertahanan.

Di sisi lain, pembangunan Jembatan Garuda saat ini tengah dalam proses penanganan oleh TNI Angkatan Darat. (Gar)



GASS POLL JALURNYA, NIKMATI WISATANYA, DAPATKAN HADIAHNYA

ETA #2

GET BACK ON TRACK

REGISTER NOW

IDR 200K

INCLUDE: T-SHIRT, ID CARD, MAKAN SIANG
UNDIAN, HIBURAN

START / FINISH

TAMAN WISATA LIANG BUKAL
DESA BATU TERING, KEC. MOYO HULU

SABTU || 2026
25 APRIL

CONTACT PERSON

ABANG ENG - 0821 4479 2434
RUDY - 0818 557830



SUPPORT BY

HADIAH UTAMA

2 UNIT MOTOR MATIC



PULUHAN HADIAH MENARIK LAINNYA

